



---

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI DESA**

Oleh

**Wibisono Poespitohadi<sup>1</sup>, Florencia Ega Tree Fe<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Merdeka Malang

Email: <sup>1</sup>[wibisono.ph@unmer.ac.id](mailto:wibisono.ph@unmer.ac.id)

**Abstract**

This study aims to analyze community participation in the Development Planning Deliberation (musrenbang) in Dalisodo Village, Wagir District, as well as the factors that influence community participation in the musrenbang. The research method used is qualitative descriptive with a focus on the form of participation in musrenbang and the supporting and inhibiting factors of participation. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation, and data analysis techniques using Miles and Huberman and Saldana. The results showed that community participation in musrenbang in Dalisodo Village, Wagir District, has been going well, but there are still several obstacles that hinder active community participation at the preparation, implementation and utilization stages, as well as related to lack of presence and understanding. The supporting factor lies in the community's own self-awareness, while the obstacles faced in active community participation are the low quality of education, lack of human resources, busy work and low level of communication. The conclusion of this study is that community participation in musrenbang has not run well and is still less active, and efforts are needed to motivate or encourage the community to actively participate in every development planning deliberative meeting in the village.

**Keywords: Community participation, Development Planning Conference**

**PENDAHULUAN**

Pembangunan negara adalah kesejahteraan warganya, seperti halnya di Indonesia. Menurut alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia. . berdasarkan kebebasan. , perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan nasional diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu (Tjkroamidjojo,1995).

Dari sudut pandang ini juga dapat dipahami bahwa pembangunan adalah usaha

bersama untuk melakukan perubahan di berbagai bidang kehidupan, agar dapat maju berdasarkan keinginan atau pendapat sendiri. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Pembangunan pedesaan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan negara dan pembangunan daerah, karena mengandung unsur pembangunan yang berkeadilan, dan hasilnya dapat mempengaruhi kepentingan sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Bahwa Pembangunan di pedesaan bertujuan untuk memperkuat masyarakat dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Pembangunan yang memberdayakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan



masyarakat pedesaan. Pembangunan yang baik pasti dimulai dengan perencanaan yang baik. Perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Perencanaan ini memerlukan partisipasi masyarakat yang baik agar kebutuhan masyarakat diketahui sampai ke daerah. Peranan masyarakat dalam pembangunan saat ini tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Prinsip pembangunan yang berpusat pada manusia menekankan bahwa masyarakat harus menjadi pemain utama dalam pembangunan. Pentingnya pembangunan yang mempengaruhi desa dan aspek kehidupan masyarakat membuat pemerintah wajib melaksanakan pekerjaan pembangunan di tingkat desa. Konsep partisipasi dalam pembangunan identik dengan kekuatan masyarakat. Partisipasi adalah distribusi kekuasaan yang memungkinkan akar rumput, yang saat ini tidak terbiasa dengan proses ekonomi dan politik, untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Ini adalah strategi di mana kelompok masyarakat berkumpul untuk memutuskan bagaimana menyebarkan informasi, merumuskan tujuan dan kebijakan, dan melaksanakan program. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Karena merekalah yang merasakan kesulitan dan perlu mengembangkan daerahnya. Mereka menggunakan dan mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan pembangunan di bidangnya. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan masyarakat di pedesaan, harus ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semua program pembangunan. Partisipasi merupakan kunci dari segalanya, termasuk berhasil tidaknya pembangunan. Kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda kemampuan awal

masyarakat untuk berkembang secara mandiri berdaulat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga membutuhkan kapasitas masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, konsep kunci yang terkait dengan pengembangan masyarakat adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, kegiatan partisipasi masyarakat bukan hanya partisipasi, tetapi juga peran, terutama dalam mengarahkan lembaga-lembaga yang melayani kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa merupakan program desa untuk mempromosikan keberlanjutan desa atau asosiasi global yang melibatkan lembaga pemerintah. LSM, swasta dan masyarakat setempat secara bersama-sama bertanggung jawab mengelola pembangunan desa melalui sumber daya fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Musrenbang Desa adalah forum pemangku kepentingan desa yang diadakan secara berkala pada waktu yang ditentukan untuk membahas, menyusun, dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. RKP Desa dan RPJM Desa itulah yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa berguna untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat dan juga bersumber dari APBD. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang didalamnya termuat RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Yang dimaksud dengan seluruh lapisan masyarakat disini adalah tokoh masyarakat, kelompok tani, LSM, pemuda pemudi dan lain sebagainya.



Desa Dalisodo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wagiri, Kabupaten Malang. Desa Dalisodo merupakan desa yang aktif dalam kegiatan Musrenbang. Dari hasil investigasi awal, wawancara dengan Abdul Kholik selaku sekretaris desa desa Dalisodo pada tanggal 10-10-2022 disimpulkan bahwa pelaksanaan Musrenbang berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala. Pelaksanaan Musrenbang di Desa Dalisodo Kecamatan Wagiri Kabupaten Administrasi Malang adalah sebagai berikut: 1) Masih ada masyarakat yang belum memahami pelaksanaan Musrenbang Desa, 2) Sosialisasi pelaksanaan musrenbang belum berjalan dengan baik. 3) Perubahan-perubahan usulan yang sering terjadi dilakukan oleh penduduk setempat.

## LANDASAN TEORI

### Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum publik yang penting karena membawa para pemangku kepentingan untuk memahami isu-isu serta permasalahan pembangunan daerah guna mencapai kesepakatan prioritas pembangunan, serta mufakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan daerah. Musrenbang bertujuan untuk menstrukturkan permasalahan, mencapai kesepakatan prioritas isu dan permasalahan daerah serta mekanisme penanganannya. Menurut Maya Rostanti (2008 : 3) “proses musrenbang memajukan setiap daerah mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Kota”.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) diadakan sebagai bagian dari sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyusunan RKP Desa harus

didasarkan dan mengacu pada RPJM Desa. Dalam penyusunannya, setiap elemen desa, baik pemerintah desa maupun seluruh lapisan masyarakat, harus dilibatkan agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan sekedar daftar keinginan elit desa. Dilihat dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dalam perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan desa agar pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat.

### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan lembaga dan proses pemerintahan. Menurut Rahardjo Adisasmita, “partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan pada perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal”. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat ditandai dengan ciri-ciri proaktif bahkan reaktif (artinya masyarakat harus ikut menalar sebelum bertindak), ada kesepakatan yang dibuat oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan, ada pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam posisi yang setara.

Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka perencanaan pembangunan diupayakan lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun harus sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.



## Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi pada dasarnya adalah suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam (*intrinsik*) maupun dari luar, termasuk pengambilan keputusan atas perencanaan pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Karena itu Yadav mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

## Jenis dan Bentuk Partisipasi

Nelson dalam Ndraha (1990 : 102) mengemukakan pendapatnya tentang jenis-jenis partisipasi sebagai berikut:

“Ada dua jenis partisipasi yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan atau antara masyarakat Pemerintahan yang diberi nama partisipasi vertikal.”

Menurut Ericson dalam Slamet (1993) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas tiga tahap, yaitu :

- 1) Partisipasi dalam tahap persiapan (*ideal planning stage*). Partisipasi dalam tahap ini berarti keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan. Masyarakat berpartisipasi dalam mengikuti rapat warga dan juga memberikan saran dan kritik dalam rapat tersebut.

- 2) Partisipasi dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi dalam tahap ini berarti keterlibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau material/barang serta ide-ide

sebagai bentuk partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

- 3) Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utulitazion stage*). Partisipasi dalam tahap ini berarti keterlibatan seseorang dalam tahap pemanfaatan suatu proyek, yaitu setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek-proyek yang telah dibangun. Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Ericson dalam Slamet. Maka dalam penelitian ini menggunakan teori ini sebagai indikator dalam fokus penelitian.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dimana sifat dari data - data yang diolah berupa data kualitatif. Penelitian ini berlokasi di desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kapupaten Malang. Subjek penelitian ini adalah aparat desa dan masyarakat desa di desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kapupaten Malang, berjumlah 5 orang sebagai informan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah: Observasi, wawancara serta dokumentasi. Tahapan pengumpulan data yang digunakan adalah: Reduksi Data , melakukan pengumpulan data , memilih hal-hal yang utama, menentukan pola atau modelnya; Penyajian Data , tersedianya informasi yang tersusun rapi sehingga proses penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan bisa jelas dan tepat dalam bentuk deskriptif , matriks, grafik, dan tabel; Menarik Kesimpulan/Verifikasi selama pengumpulan data, informasi yang dicatat diolah , diambil kesimpulan hasil.

## HASIL PENELITIAN

### Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

#### Tahap Persiapan



Bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam tahap ini yaitu keterlibatan masyarakat dalam rapat warga, dalam mengikuti sosialisasi kegiatan dan juga aktif dalam memberikan usulan dan saran maupun kritik, masyarakat juga tidak hanya berpartisipasi dengan sekedar menyampaikan usulan kegiatan perencanaan pembangunan tetapi juga mampu memahami dan mengungkapkan persoalan atau permasalahan yang terjadi di daerah mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendapat Ericson dalam Slamet (1993) bahwa partisipasi pada tahap ini berarti keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran untuk suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dalam mengikuti rapat warga dan juga memberikan saran dan kritik dalam rapat tersebut.

Sehingga, mereka dapat mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan serta mampu menentukan dan merumuskan apa yang menjadi prioritas program perencanaan pembangunan yang perlu dilaksanakan didasarkan atas potensi dan permasalahan yang dimiliki.

Berdasarkan pendapat dari Ericson dalam Slamet (1993) dengan realita yang terjadi di Desa Dalisodo adalah sebagai berikut:

Dalam tahap perencanaan, yang mana seluruh persiapan Musrenbang Desa diupayakan semaksimal mungkin oleh penyelenggara termasuk menghadirkan elemen masyarakat yang diharapkan berpartisipasi memberikan masukan dan kritikan terhadap perencanaan program pembangunan. Pihak informan dari unsur PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) mengungkapkan bahwa untuk menggalang keterlibatan masyarakat pihak PMD mengirim surat ke dusun-dusun dan menghimbau RT/RW agar melibatkan warganya dalam kegiatan Musrenbang. Selain itu Panitia penyelenggara juga membagi timnya. Ada yang bertugas dalam

penataan kondisi ruangan, ada yang bertugas menyiapkan bahan atau lampiran-lampiran yang akan di musrenbangkan dan ada yang bertugas pendampingan yaitu mendampingi masyarakat untuk penyusunan program kegiatan. Dalam tahap ini, masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif mulai dari pembentukan panitia penyelenggara.

Kemudian melakukan pembentukan panitia untuk membantu Pemdes sebagai penyusun rencana, pelaksana, pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Proses perencanaan yang dilakukan di Desa Dalisodo ini juga selalu memperhatikan keterlibatan masyarakat. Biasanya juga selalu dilakukan sosialisasi kegiatan, yang mana memberi pemahaman kepada masyarakat terkait apa yang akan dibahas pada Musrenbang nanti. Yang hadir dalam Musrenbang Desa memang hanya aktor-aktor penting dan masyarakat yang diundang saja. Aktor-aktor tersebut meliputi Ketua BPD, Ketua LPMD, Ketua RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

### **Tahap Pelaksanaan**

Bentuk keterlibatan yang diharapkan dalam tahap ini yaitu, masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam memberikan usulan pada saat pelaksanaan musrenbang. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa merupakan proses yang panjang dan bukan hanya sekedar persiapan teknis saja seperti penyebaran undang, pengaturan tempat dan konsumsi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan substansi atau materi untuk menyusun rencana pembangunan Dusun secara baik dan nanti hasilnya akan di bawah ke desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Menurut pendapat Ericson dalam Slamet (1993) yaitu partisipasi pada tahap ini berarti keterlibatan seseorang pada tahap



pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang atau material/barang serta ide-ide sebagai bentuk partisipasinya pada pekerjaan tersebut.

Berdasarkan pendapat dari Ericson dalam Slamet (1993) dengan realita yang terjadi di Desa Dalisodo adalah sebagai berikut:

Dalam pelaksanaannya, Musrenbang Desa di Desa Dalisodo dihadiri oleh tokoh-tokoh yang dinilai dapat mewakili kelompoknya. Ketika menentukan peserta yang diundang dalam Musrenbang aparat desa mengambil perwakilan dari tiap RT/RW.

Dilihat dari kenyataannya terkait keterlibatan masyarakat dalam musrenbang ini, tidak semua masyarakat terlibat aktif, mulai dari sosialisasi kegiatan kemudian musyawarah dusun hingga musrenbang ini, memang hanya masyarakat tertentu saja yang diundang, namun masih ada juga masyarakat yang diundang tetapi tidak hadir dengan alasan masih punya kesibukan yang lain.

Selain itu juga, pada saat rapat masyarakat juga sering memberikan usulan yang berubah-ubah, sehingga Pemerintah Desa bingung mana yang menjadi skala prioritas untuk perencanaan program pembangunan.

Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa harus memberikan pemahaman serta motivasi agar masyarakat mau terlibat aktif dan memahami apa yang akan di bahas pada saat rapat.

### **Tahap Pemanfaatan**

Bentuk keterlibatan masyarakat dalam tahap ini yaitu, masyarakat diharapkan turut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan di desa, seperti kegiatan pemeliharaan lingkungan sekitar, serta mampu memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ericson dalam Slamet (1993) yang menyatakan bahwa Partisipasi pada tahap ini

berarti keterlibatan seseorang dalam tahap pemanfaatan suatu proyek, yaitu setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek-proyek yang telah dibangun.

Dalam pemanfaatan ini untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pemanfaatan pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Berdasarkan pendapat dari Ericson dalam Slamet (1993) dengan realita di Desa Dalisodo adalah sebagai berikut:

Dalam tahap ini, masyarakat desa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di desa, baik itu kegiatan kerja bakti, kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang mana masyarakat selalu bergotong royong dan sangat antusias dalam menjaga kelestarian lingkungan serta memanfaatkan dan mengawasi hasil pembangunan.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat.**

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Dalisodo, tidak terlepas dari faktor pendukung dan pengahambatnya.

Adapun yang menjadi faktor pendukungnya yaitu:

- 1) Kesadaran Masyarakat
- 2) Adanya keterlibatan Masyarakat
- 3) Dukungan Kebijakan, yang diterapkan di Desa

Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu:

- 1) Kualitas pendidikan masyarakat
- 2) Waktu
- 3) Tingkat Komunikasi



## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa PMD mengirimkan surat ke desa-desa agar RT/RW melibatkan warganya dalam kegiatan Musrenbang. Desa Dalisodo selalu memperhatikan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan selalu ada sosialisasi kegiatan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat. Namun, sosialisasi dalam kegiatan ini masih belum berjalan dengan baik, dan yang hadir hanya tokoh penting dan masyarakat yang diundang. Pelaksanaan Musrenbang di Desa Dalisodo melibatkan orang-orang yang dianggap mampu mewakili kelompoknya, tetapi masih ada masyarakat yang tidak menghadiri rapat karena ada kegiatan lain, dan masih ada orang yang tidak mengerti apa yang dibicarakan dalam musyawarah itu. Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam Musrenbang sebenarnya adalah adanya kesadaran diri masyarakat itu sendiri.

Saran yang dapat diberikan adalah perlu dijaga adanya kerja sama antara Perangkat Desa dengan Kepala Dusun agar sosialisasi kegiatan dapat berjalan dengan baik, serta perlu selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait perencanaan pembangunan kepada masyarakat, serta menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan Musrenbang dari Desa hingga ke tingkat RT dan kelompok masyarakat, agar masyarakat bisa terlibat aktif dalam Musrenbang Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfitri. 2011. *Community Development (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Abu Huraerah. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- [3] Bambang Rudito dkk. 2003. *Akses Peran Serta Masyarakat lebih jauh Memahami Community Development*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- [4] Bintoro Tjokroamidjojo. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan LP3ES*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- [5] Britha Mikkelsen. 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [6] Conyers, Diana. 1954. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- [7] Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [8] Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Madar Maju. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [9] Mahi, Ali Kabul Dan Trigunarso, Indra Sri. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: KENCANA
- [10] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- [11] Ndraha, T. 1990. *Pengembangan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta., Jakarta.
- [12] Rahardjo Adisasmita. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [13] Rianingsih Djohani. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: FPPM.
- [14] Ridwan, R., & Putri, I. M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Perencanaan Pembangunan Di Desa Sepakat Bersatu Tahun 2019. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 119-137.



- 
- [15] Siagian, S. 2007. Pokok-Pokok Pembangunan Desa, Masyarakat Desa. Bandung: Citra Aditya Bahkti.
- [16] Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- [17] Soetomo. 2012. Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [18] Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [19] Sutrisna, I. W. (2022). Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 5(2), 16-24.
- [20] Suwignjo, 1985. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa. Yogyakarta; Penerbit Ghalia Indonesia.
- [21] Tilaar, H.A.R. 2009. Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta.
- [22] Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [23] Usman, H., & Akbar, P. S. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)*. Bumi Aksara.
- [24] Zuriah, Nurul, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara: Jakarta